



Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran

Regional Financial Performance Aspect that Impacted to Human Development in Expansion Area

Helly Aroza Siregar

Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Fakultas Bisnis, Jl. Ahmad Yani No. 78-88 Pekanbaru

E-mail: helly.aroz@lecturer.pelitaindonesia.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 14 Agustus 2023

Accepted: 20 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Keywords: *Expansion Area; Financial Performance; HDI*

DOI:

10.37859/jae.v13i2.5530

JEL Classification: M41, M48

Abstrak

Benarkah pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui pemekaran daerah dapat memberikan dampak yang signifikan dalam proses pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis tentang pengaruh kinerja keuangan pemerintah setelah pemekaran dalam mempengaruhi IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan mengolah data rasio keuangan dari Laporan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010 sampai dengan 2022. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kinerja keuangan yang ukurannya direfleksikan dengan Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal, Pertumbuhan PAD dan Kemandirian Keuangan berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh.

Is it true that the implementation of fiscal decentralization through the expansion of regions can have a significant impact on development and improve the welfare of people in the regions? This study aims to analyze the influence of the government's financial performance after the division in influencing the Human Development Index as an indicator of successful development and community welfare in the regions. The research method was conducted by using multiple linear regression analysis that processed financial ratio data from the APBD Report of Kepulauan Meranti Regency from 2010 to 2022. The results showed that financial performance as measured by PAD Effectiveness, Capital Expenditure Ratio, PAD Growth, and Financial Independence has a significant effect on the Index of Human Development, while the Efficiency of Regional Expenditure has no effect.

PENDAHULUAN

Pemekaran atau ekspansi daerah adalah suatu upaya untuk akselerasi pelaksanaan pembangunan (Saputra, 2021), Dimana hal ini sesuai dengan dengan PP No.129/2000, yang menetapkan bahwa dengan pelaksanaan pemekaran daerah akan dapat mempercepat pembangunan daerah dan percepatan pengelolaan berbagai potensi di daerah dengan memotong jalur birokrasi dari pemerintahan yang sebelumnya. Sementara menurut PP No.78/2007, pada bagian penjelasan disebutkan bahwa berdasarkan UU No,32/2004, pembentukan daerah pada hakikatnya memiliki untuk meningkatkan proses layanan publik untuk akselerasi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Tenrini, 2013).

Dengan demikian, maka tujuan dari suatu pemekaran daerah adalah pertama, percepatan pelaksanaan perekonomian dan pengelolaan potensi daerah, serta tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya suatu daerah baru dari hasil pemekaran, maka pemerintah diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan bertanggung jawab secara lebih dekat kepada masyarakat (Oktalina, 2020). Bukti empiris menunjukkan bahwa pemekaran daerah bertujuan untuk akselerasi pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal (Santika et al., 2018).

Menurut UNDP (2008), selama lima tahun pelaksanaan pemekaran, daerah yang baru saja melakukan pemekaran tersebut belum dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah induk (Santika et al., 2018). Artinya pemekaran daerah masih menjadi suatu permasalahan dalam mencapai tujuan pemekaran untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah. Dengan demikian, maka perlu dikaji mengenai hubungan antara pemekaran dan aspek aspek pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui aspek pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dapat diketahui dengan Indeks Pembangunan Manusia (Alam & Adib, 2017; Erwina & Badrudin, 2020; Nurcholis, 2014; Prasetyo, 2015; Wahyu Setiawan & Ariani, 2022).

Di Provinsi Riau proses pemekaran berlangsung pada daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dimekarkan pada tanggal 19 Desember 2008 dari kabupaten asal yaitu dari Kabupaten Bengkalis. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti didasarkan pada UU No. 12/2009, tanggal 16 Januari 2009 (Pembab Meranti, 2023). Dengan terbentuknya daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, maka pelaksanaan proses pemerintahan di daerah ini dimulai dengan pelimpahan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru.

Setelah berlangsung selama lebih dari empat belas tahun, pembangunan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah seharusnya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran untuk mengetahui tingkat pencapaian dimensi utama pembangunan manusia yang terdiri dari panjang umur dan sehat, berilmu dan memiliki standar hidup yang layak (*United Nations Development Reports*, 2020). Ukuran ini menjadi sangat penting karena mencakup aspek dasar dari seorang manusia yang hidup disuatu negara dengan layak yang mana diukur secara fisik dan non fisik (Ma'rif & Ibrahim, 2020; Nasruddin & Azizah, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Meranti berada di bawah IPM Provinsi Riau dan IPM rata-rata di Indonesia. IPM di Provinsi Riau termasuk tinggi di Indonesia. Berikut ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti:

Tabel 1: Komparasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d. 2022

Tahun	Indonesia		Provinsi Riau		Kep. Meranti	
	IPM	Peningkatan	IPM	Peningkatan	IPM	Peningkatan
2010	66,53	-	68,65	-	59,71	-
2011	67,09	0,84	68,90	0,36	60,38	1,12
2012	67,70	0,91	69,15	0,36	61,49	1,84
2013	68,31	0,90	69,91	1,10	62,53	1,69

2014	68,90	0,86	70,33	0,60	62,91	0,61
2015	69,55	0,94	70,84	0,73	63,25	0,54
2016	70,18	0,91	71,20	0,51	63,90	1,03
2017	70,81	0,90	71,79	0,83	64,70	1,25
2018	71,39	0,82	72,44	0,91	65,23	0,82
2019	71,92	0,74	73,00	0,77	65,93	1,07
2020	71,94	0,03	72,71	-0,40	65,50	-0,65
2021	72,29	0,49	72,94	0,32	65,70	0,31
2022	72,91	0,86	73,52	0,80	66,52	1,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai IPM di Kepulauan Meranti berada dibawah IPM Provinsi Riau. Hal ini menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan setelah pemekaran dengan tujuan untuk menjadi daerah yang lebih berkembang dan maju. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus dapat mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan sangat berkaitan dengan kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur suksesnya pengelolaan keuangan. Kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus ditinjau untuk mengetahui pelaksanaan desentralisasi daerah yang diselenggarakan setelah adanya pemekaran.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah atau Pemda dinilai dengan ukuran kinerja keuangan dalam bentuk analisis rasio keuangan yang diperoleh dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang merupakan perhitungan APBD (Dali et al., 2021).

Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, beberapa diantaranya adalah rasio efisiensi (Armaja et al., 2017; Hafizi & Amalia, 2022; Mariasari & Sunaningsih, 2021; Mataris & Digdowiseiso, 2022), rasio efektivitas (Fathah, 2017; Mataris & Digdowiseiso, 2022; Ramadhan et al., 2022; Wibawa et al., 2023), rasio belanja modal (Fathah, 2017; Karinda et al., 2013; Rosaliena & Zulkifli, 2019), rasio pertumbuhan PAD (Devi et al., 2022; Nuri Andriyani et al., 2020; Walintukan et al., 2019), dan rasio kemandirian keuangan (Fitriyani et al., 2019; Runjung et al., 2022).

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan kondisi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat tidak konsisten. Belum ditemukan hubungan linier antara pola pengeluaran pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat (Habbe, 2021). Namun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan memberikan pengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia, dimana indeks ini merupakan ukuran dari kesejahteraan masyarakat di daerah (Mulia & Saputra, 2020).

Menurut hasil penelitian terdahulu, kinerja keuangan pemerintah memberikan efek pada Indeks Pembangunan Manusia (Dwiandari & Badera, 2018; Suranta et al., 2019). Kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Gousario & Dharmastuti, 2015; Winarni et al., 2022), kinerja desentralisasi fiskal berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (Harliyani & Haryadi, 2016), rasio efektivitas dan efisiensi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Gousario & Dharmastuti, 2015). Namun demikian hasil penelitian (Sofia Arie Damayanty, Singgih Riphath, Hadi Setiawan, 2016) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas dengan Indeks Pembangunan Manusia, rasio efektivitas dan efisiensi tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (Astuti, 2019). Selain itu penelitian dari (Suranta et al., 2019) menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan IPM antara daerah di pulau Jawa dan Kalimantan, dimana IPM tersebut dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan adanya gap dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas, efisiensi, belanja modal, pertumbuhan PAD dan kemandirian keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah yang baru mengalami pemekaran yang terjadi pada era desentralisasi fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *library research*. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk *time series* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan APBD dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI dan literatur serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan pada Kabupaten Kepulauan Meranti pada periode 2010 sampai dengan 2022.

Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan operasional variabel sebagai berikut:

1. Efektivitas PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ditargetkan. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Indikator Efektivitas PAD yaitu: >100% = Sangat efektif; 90% - 100% = Efektif; 80% - 90% = Cukup Efektif; 60% - 80% = Kurang Efektif; Kurang 60% = Tidak Efektif (Winarni et al., 2022)

2. Efisiensi Belanja Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan penggunaan pengeluaran anggaran. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator Efektivitas Belanja Daerah = >100% = Tidak efisien; 90% - 100% = Kurang efisien; 80% - 90% = Cukup Efisien; 60% - 80% = Efisien; 60% = Sangat efisien (Maidar & Rosalia, 2022)

3. Rasio Belanja Modal menunjukkan besarnya proporsi Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan daerah. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Pertumbuhan PAD merupakan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun kekayaan asli dari daerah pada tahun tertentu jika dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_n - \text{PAD}_{n-1}}{\text{PAD}_{n-1}} \times 100\%$$

5. Kemandirian Keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan dan program pemerintahan dari sumber pendapatan asli dari daerah. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Indikator Kemandirian Keuangan= 75%-100% = Tinggi; 50%-75% = Sedang; 25%-50% Rendah; 0 -25%= Rendah sekali (Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021)

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{Kesehatan}} + I_{\text{Pendidikan}} + I_{\text{Pengeluaran}}} \times 100$$

Indikator Indeks Pembangunan Manusia= >80 = Sangat tinggi; 70-80 = Tinggi; 60 - <70 = Sedang; < 60 = Rendah (PBB dalam (Yektiningsih, 2018)

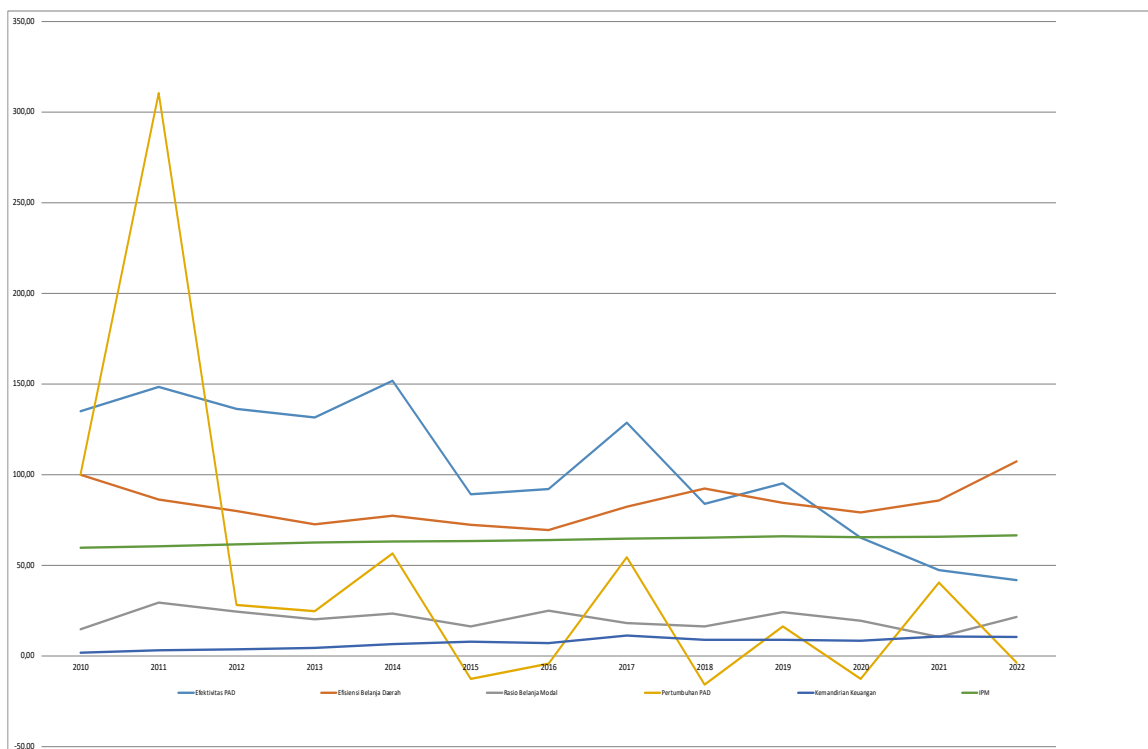
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja keuangan keuangan yang terdiri dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X1), Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X2), Rasio Belanja Modal (X3), dan Pertumbuhan PAD (X4) dan Kemandirian Keuangan (X5) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di daerah setelah pemekaran. Dengan demikian rumus untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e.$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik berikut merupakan gambaran kinerja keuangan dan IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti setelah pemekaran.



Gambar 1. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat stabil dalam satu dekade lebih. Peningkatan IPM ini sangat berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah yang berfluktuasi. Kemandirian keuangan daerah merupakan satu-satunya kinerja keuangan yang terus mengalami pertumbuhan yang positif sejak terjadinya pemekaran, namun demikian proporsi PAD terhadap Dana Perimbangan berada pada posisi “rendah sekali” dengan tingkat kemandirian daerah pada angka kurang dari 25%.

Kemampuan realisasi PAD jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan ditunjukkan dengan rasio Efektivitas PAD. Dalam periode penelitian, rasio ini menunjukkan penurunan. Meskipun terus mengalami penurunan, namun secara rata-rata, efektivitas PAD di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 103,52%, yang mana berada dalam posisi “sangat efektif”. Efektivitas PAD yang sangat efektif merupakan gambaran kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan yang sudah disusun dalam anggaran sebagai target pemasukan asli dari daerah. Sementara, Efisiensi Belanja Daerah berfluktuasi, dimana rata-rata kemampuan pemerintah dalam menghemat anggaran belanja adalah 98,97,73 %. Ini menunjukkan bahwa kinerja efisiensi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori “kurang efisien”.

Adapun Pertumbuhan PAD berfluktuasi, peningkatan PAD melonjak pada tahun 2011 sebesar tiga kali lipa jika dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini dapat dimungkinkan karena faktor kesiapan pemerintah dalam mendata dan menghimpun PAD. Pada tahun 2010 PAD di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat minim karena daerah ini baru saja mengalami pemekaran.

Beriringan dengan kinerja penerimaan, disisi lain, penggunaan penerimaan tersebut kemudian wajib dibelanjakan untuk pembangunan daerah, hal ini tercermin dari Rasio Belanja Modal. Secara rata-rata, Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah adalah lebih dari seperlima bagian. Artinya, sekitar 20% dari Belanja Daerah digunakan oleh pemerintah sebagai biaya pembangunan. Pada dasarnya, proporsi Belanja Modal yang semakin besar dari besarnya Belanja Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menyalurkan anggaran daerah untuk pelaksanaan Pembangunan infrastruktur di daerah. Menilik dari besarnya Belanja Modal yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan di daerah pemekaran ini, maka perlu dievaluasi kembali mengenai proses penganggaran dalam meningkatkan besarnya Belanja Modal di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada langkah awal pengolahan data, dilakukan Uji normalitas dan asumsi klasik. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov memperoleh hasil Asymp. Sig. sebesar 0,975 atau lebih besar dari 0,05, sehingga data terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF menunjukkan hasil bahwa nilai tolerance seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat pola gambar scatterplot, dimana titik-titik menyebar dan tidak berpola, sehingga disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Adapun koefisien determinasi pada model regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.964	.938	.54556

a. Predictors: (Constant), Kemandirian Keuangan, Rasio Belanja Modal, Pertumbuhan PAD, Efisiensi Belanja Daerah, Efektivitas PAD

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,938 yang menunjukkan bahwa 93,8% dari Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diprediksi dengan variabel kinerja keuangan yang terdiri dari efektivitas PAD, efisiensi Belanja Daerah, Pertumbuhan PAD, Rasio Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan. Sedangkan, 6,2% merupakan sumbangsih dari faktor lain di luar model regresi pada penelitian ini.

Tabel berikut menunjukkan hasil uji regresi linear berganda pada model penelitian:

Tabel 3: Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	61.918	1.549		39.964	.000		
Efektivitas PAD	-.016	.006	-.271	-2.467	.043	.429	2.332
Efisiensi BD	-.021	.014	-.137	-1.475	.184	.599	1.668
Rasio BM	.092	.036	.213	2.561	.037	.748	1.337
Pertumbuhan PAD	-.006	.002	-.230	-2.416	.046	.573	1.745
Kemandirian	.545	.081	.775	6.725	.000	.389	2.571

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Hasil uji regresi untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan membandingkan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Signifikansi	Keputusan
Efektivitas PAD (X1)	.043 < 0,05	Berpengaruh signifikan
Efisiensi Belanja Daerah (X2)	.184 > 0,05	Tidak Berpengaruh
Rasio Belanja Modal (X3)	.037 < 0,05	Berpengaruh Signifikan
Pertumbuhan PAD (X4)	.046 < 0,05	Berpengaruh signifikan
Kemandirian Keuangan (X5)	.000 < 0,05	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PAD berpengaruh pada IPM di daerah pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Efektivitas PAD merupakan suatu bentuk ukuran kinerja yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target PAD di Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana dalam satu dekade lebih pemekaran terjadi, kinerja keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah berjalan dengan sangat efektif. Artinya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menghimpun dana PAD dari anggaran yang sudah ditetapkan dengan sangat baik atau tepat hasil.

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh Efektivitas PAD terhadap IPM, namun perlu menjadi catatan bahwa IPM di Kabupaten Meranti dalam periode penelitian menunjukkan indeks yang masih dalam kategori sedang dan catatan penting lainnya adalah, IPM di daerah pemekaran ini masih berada di bawah IPM provinsi. Namun demikian, adanya pengaruh Efektivitas PAD terhadap IPM merupakan suatu sinyal positif yang perlu dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Efektivitas PAD sangat penting dijaga agar peningkatan PAD di daerah dapat menjadi sumber keuangan untuk

membiayai pembangunan di daerah dan ketergantungan terhadap pendanaan dari luar dapat berkurang. Terutama, penggunaan keuangan daerah tersebut adalah untuk membiayai aspek-aspek pembangunan pada sektor mendasar yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan yang mana menunjukkan tingkat kesejahteraan Masyarakat di daerah.

Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berada dalam kategori kurang efisien. Efisiensi digunakan untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran yang telah dilaksanakan. Rasio efisiensi Belanja Daerah menggambarkan banyaknya Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam bentuk Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh pada IPM. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum efisien dalam menggunakan anggaran Belanja Daerah, karena pengeluaran Belanja Daerah masih di atas 90% dari Pendapatan Daerah. Penggunaan anggaran yang efisien dapat menghemat anggaran yang data digunakan untuk investasi pada sektor-sektor strategis untuk meningkatkan PAD. Dimana dana dari PAD ini akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

Proporsi Belanja Modal jika dibandingkan dengan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 20% lebih. Artinya, pemerintah daerah menyisihkan seperlima anggaran Belanja Daerah untuk kepentingan pembangunan yang tertuang dalam bentuk Belanja Modal. Idealnya, semakin tinggi Belanja Modal di daerah, maka pelaksanaan pembangunan di daerah akan lebih baik, karena sumber anggaran yang lebih banyak. Namun, hal ini perlu didukung dengan pelaksana kegiatan atau program pembangunan yang bersih dan menjunjung *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Belanja Modal berpengaruh pada IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dapat menunjukkan bahwa besarnya Belanja Modal yang dianggarkan pemerintah daerah dapat meningkatkan IPM di daerah.

Sebagai suatu daerah yang baru saja mengalami pemekaran pada tahun 2009, tahun 2010 merupakan tahun awal daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memperoleh PAD dengan jumlah yang masih sangat minim. Pada tahun 2011 terjadi lonjakan peningkatan PAD sebesar lebih dari tiga kali lipat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sumber kekayaan yang ada di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertumbuhan PAD sangat penting untuk melihat besarnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali dan menghimpun sumber-sumber kekayaan asli dari daerah. Pertumbuhan PAD merupakan indikator bahwa pelaksanaan desentralisasi di daerah berhasil dilakukan.

Kemandirian keuangan di daerah adalah tolok ukur keberhasilan pemekaran daerah. Tujuan pemekaran daerah adalah agar pembangunan di daerah lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Meskipun tingkat kemandirian keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah, namun kemandirian keuangan yang perlahan meningkat sudah seharusnya memberikan dampak pada pembangunan, terutama pembangunan manusia di daerah.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti setelah pemekaran berada dalam kategori “sedang”, dimana sejak tahun 2010 sampai dengan 2022, tingkat IPM terus meningkat. Efektivitas PAD di Kabupaten Kepulauan Meranti berada dalam kategori “sangat efektif”, sementara Efisiensi Belanja Daerah berada dalam kategori “kurang efisien”. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ditunjukkan dengan Rasio Belanja Modal adalah seperlima bagian. Kemudian Pertumbuhan PAD masih belum stabil mengalami peningkatan. Kinerja keuangan yang berperan dalam mempengaruhi IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal, Pertumbuhan

PAD dan Kemandirian Keuangan dengan pengaruh yang signifikan. Sedangkan, kinerja Efisiensi Belanja Daerah tidak berpengaruh pada IPM.

SARAN

Menimbang bahwa tingkat IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih berada di bawah rata-rata dari IPM di Provinsi Riau, diharapkan agar pembangunan di daerah yang telah mengalami pemekaran selama 13 tahun ini lebih meningkat lagi. Alokasi Belanja Modal yang hendaknya ditingkatkan lagi dari proporsi Belanja Daerah agar pelaksanaan pembangunan memiliki sumber dana yang lebih mumpuni. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah agar kinerja keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Proporsi Belanja Modal yang masih minim hendaknya dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, K. Z., & Adib, N. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013–2015). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 5(2).
- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Astuti, et al. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 384–397.
- Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.33772/jak-uh0.v6i1.19500>
- Devi, A. S., Masnila, N. M., & Nurhasanah, N. N. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i06.1872>
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1741–1770. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p04>
- Erwina, W., & Badrudin, R. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Gini Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderating di Indones. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 31(2), 109–120.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Fitriyani, I., Sumbawati, N. K., & Puspita, B. (2019). Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2013-2017. *Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 26–36.
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). *Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study In 20 Counties/Cities of Level I Region. The Winners*, 16(2), 152–165. <https://doi.org/10.21512/tw.v16i2.1568>
- Habbe, A. H. (2021). The exploration of effect of financial performance to the public welfare. *International Journal of Law and Management*, 63(5). <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0222>

- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3514>
- Karinda, C. Y., Ilat, V., & Mawikere, L. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*. <https://doi.org/10.32400/ja.3689.2.2.2013.73-84>
- Maidar, M., & Rosalia, H. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kominukasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020. *Jurnal Serambi Akademika*, 10(6), 588–594.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuabuana*, 7(2).
- Ma'rif, E. F., & Ibrahim, M. (2020). Analisis Percepatan Peningkatan IPM Menggunakan Metode Holt: Studi Kasus Negara ASEAN. *Jurnal Kajian Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 19–26.
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 1–31. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal EL-RİYASAH*, 11(1). <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>
- Nasruddin, N., & Azizah, N. A. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara Asean. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.20527/jgp.v3i1.5031>
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 48. <https://doi.org/10.22219/jep.v12i1.3654>
- Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, & Enggar Diah PA. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 132–144. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Nuzullestary, V., & Mulyaningsih, E. (2021). Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. *Tirtayasa Ekonomika*. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.10175>
- Oktalina, G. (2020). *Analysis of Regional Financial Performance through the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Growth Ratio in the District South Bangka*. *International Journal of Finance Research*, 1(2). <https://doi.org/10.47747/financeinvestmentderivative.v1i2.99>
- Pemkab Meranti. (2023). *Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. <http://news.merantikab.go.id/web/profil/sejarah>
- Prasetyo, W. E. (2015). *Hubungan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember.
- Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6), 832–846. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>

- Rosaliena, V., & Zulkifli, Z. (2019). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 27(2), 175–189. <https://doi.org/10.32477/jkb.v27i2.60>
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- Santika, R. H., Santoso, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.15-23>
- Saputra, R. (2021). *Policy Evaluation of Regional Expansion and Determination Regional Boundaries in Banten And West Java Province*. *Sosiohumaniora*, 23(3). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.34597>
- Sofia Arie Damayanty, Singgih Riphath, Hadi Setiawan. (2016). *Causality Analysis Between Financial Performance and Human Development Index: A Case Study of Provinces In Eastern Indonesia*. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3). <https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.195>
- Suranta, S., Bandi, B., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2019). *Regional financial performance and human development index: Study in Central Java and South Kalimantan provinces*. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss2.art2>
- Tenrini, R. H. (2013). *Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi? Mengapa Harus Mekar*. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
- United Nations Development Reports. (2020). Human Development Index (HDI) | Human Development Reports. In *United Nations*.
- Wahyu Setiawan, A., & Ariani, M. B. N. (2022). Determinasi Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.505>
- Walintukan, V., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh Desentralisasi, Pertumbuhan PAD dan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota di Provinsi Sulut Tahun 2009-2017. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(3), 48–59. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23453.20.01.2019>
- Wibawa, I. G. A., Antarini, L., & Marsitadewi, E. (2023). Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 20–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.20-34>
- Winarni, E., Handayani, R., & Soleh, A. (2022). Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 270–276. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.369>
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 32–50. <https://doi.org/10.30742/jisa1822018528>